

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu radikalisme masih menghantui masyarakat Indonesia. Diskursus itu kembali mencuat seiring ditangkapnya pemimpin ormas Khilfatul Muslimin Abdul Kadir Hasan Baraja di Lampung pada 7 Juni 2022. Tak berselang lama, tetiba publik kembali dikejutkan dengan pemberitaan terkuaknya dugaan penyalahgunaan donasi lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang melibatkan Ahyudin selaku pendiri sekaligus mantan Ketua Yayasan ACT. Setidaknya penyelidikan yang dilakukan oleh media Tempo, Polri, dan PPAK mengindikasikan adanya dugaan aliran dana yang dikelola ACT sampai kepada kelompok radikalisme.

Dalam lintasan sejarah hingga saat ini, terminologi radikalisme tidak habis dibahas karena menuai pro-kontra, baik dalam ruang-ruang diskusi, publikasi ilmiah, hingga pada pemberitaan media. Sebagai contoh dari pro-kontra khususnya terkait dengan HTI, yaitu adanya dua sisi persepsi yang terbangun di masyarakat akar rumput bahwa HTI radikal. HTI ingin mengganti ideologi Pancasila. HTI bertentangan dengan asas demokrasi, hingga kemudian dugaan HTI beragenda makar. Sebaliknya, di sisi lain, ada persepsi pula bahwa pemerintah menzolimi HTI. Pemerintah otoriter terhadap HTI, dan sebagainya. Dialektika ini terus berkembang yang sampai saat ini belum berujung.

Jika kita menilik fakta sejarah di Eropa atau Britania Raya pada akhir abad ke-18 istilah radikalisme ini disematkan kepada kelompok yang mendukung gerakan radikal dalam reformasi sistem pemilihan atau sistem demokrasi untuk melawan sistem monarki atau sistem kerajaan yang berlaku pada saat itu. Hal senada dapat pula dilihat pada masa kolonial Belanda di Indonesia dimana yang dianggap radikal itu adalah

pribumi yang melawan penjajah untuk memperjuangkan kemerdekaan negerinya. Di penghujung rezim Orde Baru tahun 1998 yang dianggap radikal adalah pejuang pro demokrasi atau mahasiswa yang ingin menumbangkan rezim Orde Baru yang dianggap otoriter. Fakta-fakta sejarah tersebut memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa ketika seorang individu atau kelompok yang mengganggu zona kenyamanan “penguasa” (pemerintah, raja, presiden, dan sebagainya) maka akan dicap radikal.

Di rezim manapun di dunia ini, pihak-pihak yang mencoba melawan arus, berseberangan sikap, berada di pihak oposisi, atau sering mengkritik kebijakan maupun kinerja penguasa, maka bukan tidak mungkin akan dianggap radikal. Penguasa akan berusaha mengonstruksi suatu wacana bahwa kelompok itu radikal, mengancam kedaulatan bangsa, atau istilah-istilah stigmatisasi lainnya. Penguasa sebagai pihak yang mendominasi tidak jarang mengirim wacana manipulatif dan penyesatan opini demi untuk melanggengkan kekuasaan. Terkait hal tersebut, penulis mengemukakan hasil penelitian Wah dan Ming (2010) yang menyatakan bahwa perlunya peningkatan kesadaran publik untuk lebih kritis dan verifikasi terhadap berbagai wacana ideologis yang dimanifestasikan melalui pemberitaan media massa. Hal tersebut dikarenakan sifat semua teks sebagai representasi kompleks dan konstruksi praktik-praktik sosial dari posisi ideologis penguasa.

Lalu bagaimana jalan cerita sehingga kemudian suatu ideologi dan gerakan perubahan disebut radikal. Dan mengapa istilah itu diatribusi dan dinormalisasi kepada umat dan kelompok Islam. Abdullah (2016: 2) mengatakan bahwa fenomena radikalisme dalam Islam sebenarnya diyakini sebagai produk atau ciptaan abad ke-20 di dunia Islam, terutama di Timur Tengah. Hal itu sebagai hasil dari krisis identitas yang berujung pada reaksi dan resistensi terhadap Barat yang melebarkan kolonialisme dan imperialisme ke dunia Islam. Oleh karena itu, dapat ditafsirkan bahwa awalnya

radikalisme ini lahir sebagai sebuah bentuk manifestasi perlawanan atau reaksi atas perasaan ketidakadilan, kekecewaan, ketidakpuasaan, diskriminasi, dan “penjajahan” oleh seseorang atau kelompok yang lebih dominan kepada orang atau kelompok yang termarginalkan sehingga timbul ketimpangan dalam realitas kehidupan sosial.

Dalam identifikasi Jamhari Makruf (2007), radikalisme ini ditandai dengan kriteria seperti ingin menegakkan negara Islam, melihat pertentangan Islam dan Kristen sebagai jihad, perang abadi di antara keduanya, dan beberapa kriteria lainnya. Dari situ, kemudian ia membagi lagi kelompok-kelompok radikal tersebut ke dalam dua kutub besar. *Pertama*, kelompok yang lebih mengedepankan *activism*, dengan aktif berdemonstrasi dan melakukan kekerasan-kekerasan fisik. Dan *kedua*, adalah kelompok yang cenderung bermain di tingkat diskursus. Kelompok pertama yang gerakannya dapat diamati secara fisik diwakili oleh Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad dan sebagainya. Sementara kelompok kedua yang bermain di tataran diskursus diwakili oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Mereka memang tidak *violence* dan radikal secara fisik, tetapi secara akal dan ideologis sangat radikal karena menentang demokrasi dan konstitusi negara.

Dalam praktiknya di seluruh belahan dunia, radikalisme menampilkan wajah-wajah lokalitas dengan berbagai macam ekspresi ideologis dan aksi, serta dilatarbelakangi oleh berbagai faktor dan tujuan. Kita dapat melihat peristiwa di Afghanistan dengan eksistensi kelompok Taliban yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Ashraf Ghani pada 15 Agustus 2021 yang sarat muatan politik dan ideologis. Di Guinea – Afrika pada 5 September 2020 adanya aksi Kudeta Militer oleh pasukan khusus Guinea atas pemerintahan Presiden Alpha Conde yang disebabkan oleh merajalelanya korupsi dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Di Thailand adanya konflik dan pertarungan hegemoni antara Kaum Budha

dan Muslim di Selatan Thailand yang menyebabkan krisis politik di Thailand yang berlarut-larut pada tahun 2005 (Jory & Saengthong, 2020), dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang di mana berawal dari wacana ketidakadilan lalu termanifestasi secara eksplosif menjadi peristiwa atau tindakan sosial.

Di Indonesia radikalisme sebenarnya telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka dimana saat itu gerakan radikal didorong oleh perjuangan bangsa Indonesia untuk bebas dari belenggu kolonialisme. Namun demikian, di era perjuangan kemerdekaan, istilah radikalisme yang semula sebagai gerakan konstruktif berubah 180° di masa pascakemerdekaan menjadi gerakan radikalisme yang destruktif. Hal ini disebabkan oleh faktor yang cukup kompleks, seperti pertentangan ideologi, kekecewaan kepada pemerintah, klaim kegagalan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat, dan sebagainya. Sebut saja, misalnya, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) sebagai sebuah gerakan politik yang didirikan pada 7 Agustus 1949 oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Jawa Barat. Gerakan ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia menjadi negara Islam atau sebagai sebuah negara yang menerapkan syariat Islam sebagai dasar negara, yang kemudian diikuti oleh pemberontakan DI/TII atau Negara Islam Indonesia (NII) oleh Tgk. M. Daud Beureueh di Aceh pada 20 September 1953, dan Pemberontakan DI/TII atau NII oleh Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan pada 1950 sampai 1965 (Putra, 2021).

Adapun pada Era Orde Baru hingga Era Reformasi saat ini beberapa kelompok Islam radikal diduga masih eksis, seperti Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MII), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah Ansharut Tauhid (JAK), hingga dugaan dialamatkan kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Khusus pada HTI, organisasi ini pertama kali masuk ke Indonesia pada 1983 yang dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubalig sekaligus

aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia. Ia memulainya dengan mengajarkan pemahaman atau ideologi ke beberapa kampus di Indonesia hingga menjadi salah satu gerakan, yakni Gema Pembebasan yang dimotori oleh mahasiswa yang bermula di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Berbeda dengan aksi-aksi radikalisme yang disertai adanya kekerasan seperti NII, JI, MII, JAT yang diduga berafiliasi dengan ISIS, jalan berbeda ditempuh oleh HTI dimana ia lebih memilih jalan dakwah dengan melakukan gerakan indoktrinasi dan reideologi dengan cara kajian-kajian ilmiah dan kajian keagamaan, menulis opini dan esai di media massa, buletin, hingga dakwah di masjid-masjid untuk menyuarakan khilafah Islam. HTI memandang bahwa upaya untuk membebaskan umat Islam dari kemunduran dan penderitaan adalah jika syariat Islam bisa diterapkan dan ditegakkan secara menyeluruh. Hizbut Tahrir juga memandang bahwa yang bisa menjamin penerapan syariat Islam adalah daulah khilafah Islam (Arifin, 2010: 78). Maka berawal dari itulah, dalam beberapa *Buletin Dakwah Al-Islam* yang diterbitkan Hizbut Tahrir, sering ditemukan seruan untuk menegakkan daulah khilafah Islam (Shofwan, 2016: 145-147).

Penguasa menduga HTI menjadi salah satu ancaman Indonesia terkait isu-isu keamanan, kedamaian, pertahanan, dan kedaulatan NKRI. Hal itu berdasar pada upaya HTI mempropagandakan model kepemimpinan khilafah yang dilakukan dengan metode dan strategi pergerakan yang masif, halus, meskipun beberapa ada yang muncul kepermukaan dalam bentuk kegiatan dalam rangka reideologi. Adapun kegiatan yang menandai besarnya kekuatan HTI salah satunya ditandai saat puncak acara Mukhtar Khilafah pada Ahad, 2 Juni 2013 di Stadion Gelora Bung Karno. Kegiatan tersebut bertema “Perubahan Besar Dunia Menuju Khilafah” yang dihadiri oleh sekira 100 ribu anggota dan simpatisan HTI, dan juga dilaksanakan di 31 kota lainnya di seluruh

Indonesia (Republika, 2 Juni 2013). Kegiatan itu pula diwarnai dengan testimoni dari beberapa tokoh pejuang khilafah dari berbagai negara, seperti Lebanon, Yaman, Inggris, dan sebagainya.



Gambar 1.1 Ribuan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengikuti puncak acara Mukhtamar Khilafah (Sumber: [Republika.co.id, https://www.republika.co.id/berita/mnrpwt/ribuan-massa-hizbut-tahrir-padati-stadion-gbk](https://www.republika.co.id/berita/mnrpwt/ribuan-massa-hizbut-tahrir-padati-stadion-gbk), diakses 12 Agustus 2022, pukul 10.21 WIB).

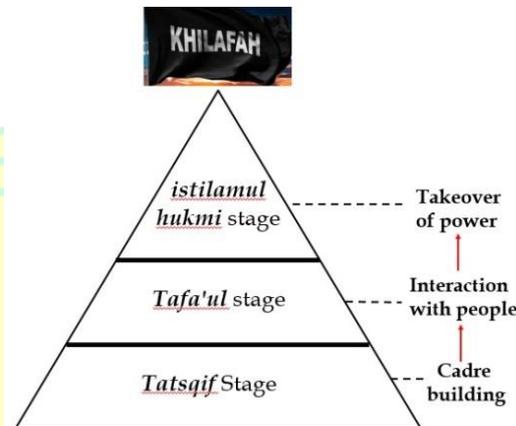
Menurut HTI untuk memobilisasi perjuangan menegakkan daulah khilafah Islam terdapat 4 (empat) pilar yang harus ditegakkan, yaitu 1) kedaulatan di tangan syariah (*al-siyādah li al-syar'i*); 2) menetapkan kekuasaan di tangan umat (*al-sulthān li al-ummah*); 3) kewajiban mengangkat satu orang khilafah atas seluruh kaum muslimin; dan 4) khalifah mempunyai hak khusus dalam melegislasikan hukum syara' menjadi UUD dan segenap undang-undang. Oleh karena itu, HTI menentang keras demokrasi karena menurut mereka sistem tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam pada titik hak untuk menerbitkan hukum. Dalam Islam, kata dia, kedaulatan di tangan Allah. "Kedaulatan bukan di tangan rakyat dalam makna siapa yang punya hak membuat hukum," (Ismail Yusanto dalam Tempo, 9 Mei 2017).

Pernyataan Ismail Yusanto secara kritis dapat dimaknai bahwa HTI tidak mengakui Pancasila dan konstitusi negara UUD 1945 dimana dalam Pasal 1 ayat

(2) dikatakan “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Oleh karena itu, poin penting klaim atau dugaan bahwa HTI berideologi radikal karena secara jelas bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi UUD 1945 sehingga organisasi ini kemudian dibubarkan oleh pemerintah dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-30.AH.01.08 tanggal 19 Juli 2017. Keputusan ini memiliki payung hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di mana Perppu tersebut mengatur pembubaran ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Terkait pembubaran itu, Azyumardi Azra (Kompas, 2021) mengatakan bahwa pembubaran HTI menjadi peristiwa penting dalam sejarah gerakan Islam di Indonesia.

HTI secara substantif merupakan organisasi politik, meskipun secara formal tidak menjadi partai politik atau tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis. Dalam aktifitasnya harus diakui bahwa mereka memiliki niat dan tujuan politik, yang kemudian menggunakan agama sebagai jembatan untuk mencapai tujuan ‘politik’ tersebut. Pernyataan itu dikuatkan oleh Osman (2010: 736) yang menyatakan bahwa HTI adalah bagian dari organisasi Hizbut Tahrir global. HT didirikan di Yerusalem oleh cendekiawan Islam Syekh Muhammad Taqiyyuddin an-Nabhani, yang berusaha untuk mendirikan partai politik yang berideologi Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat (Arifin, 2015: 141) yang menyatakan bahwa institusi kepartaian Hizbut Tahrir yang didirikan an-Nabhani pada tahun 1953 merupakan basis perjuangan Hizbut Tahrir untuk mendirikan kembali daulah khilafah Islam pascaruntuhnya khilafah Utsmaniyah atau Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1924.

Ada tiga tahap atau langkah HTI dalam upaya mencapai tujuan politiknya, yaitu secara vertikal dari bawah ke atas, yaitu *tatsqif*, *tafa'ul*, dan *istilamul hukmi*. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2 Tiga tahap perjuangan HTI mendirikan khilafah (dimodifikasi dari Abdullah, 2016: 11).

Pertama, tahap tatsqif (pembinaan dan pengkaderan). Tahap ini untuk melahirkan orang-orang yang meyakini fikrah Hizbut Tahrir dan untuk membentuk kerangka sebuah partai. *Kedua, tahap tafa'ul* (interaksi), yaitu berinteraksi dengan umat agar mampu mengemban dakwah Islam, sehingga umat akan menjadikannya sebagai masalah utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam realitas kehidupan. Pada tahap ini, juga diharapkan massa termobilisasi dengan massif. Terakhir, *ketiga, tahap istilamul hukmi* (pengambil alihan kekuasaan). Tahap ini berfungsi untuk menerapkan konsep daulah khilafah Islam secara praktis dan totalitas, sekaligus untuk menyebarkanluaskannya ke seluruh dunia (Abdullah, 2016: 11).

Sebenarnya konsep kepemimpinan khilafah pada zaman Rasul tidak pernah dirumuskan atau diajarkan atau juga disabdakan oleh Rasulullah. Konsep khilafah yang diperjuangkan HTI merupakan konsep politik dan kepemimpinan pasca-Rasulullah. Persoalan khilafah (juga imamah, dan pembentukan daulah atau negara) dalam teori politik Muslim Sunni secara eksistensial diakui keberadaannya didasari pada konsensus

umat Islam periode awal, yaitu beberapa saat setelah Rasulullah wafat. Artinya, landasannya lebih pada apa yang disebut sebagai *ijma* (kesepakatan) sahabat sepeninggal Rasulullah. Para pemikir Muslim Arab menegaskan bahwa pemikiran politik tentang khilafah dan imamah sama sekali tidak berlandaskan pada tuntunan keagamaan yang lurus. Ia tidak bersumber pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bahkan secara keras Ali Abd Al-Raziq menegaskan bahwa “khilafah – dulu dan sampai saat ini – hanya menjadi bencana bagi Islam dan kaum Muslim, juga sumber keburukan dan kebobrokan. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa agama dan dunia kita tidak membutuhkan khilafah dalam pengertian fiqih politik (Darraz dalam Azra, 2017: 502).

Poin kunci atas atribusi HTI radikal sebenarnya bukan pada penegakan syariat Islam itu sendiri, akan tetapi karena ideologi dan pergerakannya yang memasuki ranah politik dan pemerintahan di Republik Indonesia di mana mereka menentang demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945 dengan menyebutnya sebagai taghut, haram, atau kafir. Namun demikian, meskipun klaim radikal itu telah melekat pada HTI, tidak secara otomatis juga bahwa mereka kehilangan atensi, eksistensi, dan simpati publik. Disadari atau tidak, ada dinamika pertarungan ideologis yang melibatkan relasi kekuasaan pada praktik-praktik di berbagai aspek kehidupan di Indonesia baik sebelum maupun pascapembubarannya. Pertarungan ideologis tersebut dapat dilihat berbagai saluran, salah satunya dalam representasi diskursus radikalisme HTI di berbagai teks berita media.

Dengan merebaknya paham-paham radikal akhir-akhir ini, seyogyanya diperlukan langkah-langkah preventif agar paham-paham tersebut tidak menyebar dan menjalar luas di kalangan masyarakat. Langkah dan upaya yang dilakukan adalah dengan mengusung narasi-narasi alternatif sebagai narasi kontra radikalisme. Penelitian ini menawarkan salah satu solusi yang dapat berkontribusi terhadap pencegahan paham-

paham radikal, yaitu dengan mengangkat pantun lokal yang menjadi kearifan lokal, serta pembelajaran dalam menulis sastra di perguruan tinggi. *Standing* teori yang digunakan mengapa perlu memberdayakan pantun, penulis mengutip pendapat Anoeграjekti dkk (2018: 9-10) yang menyatakan bahwa *including art and culture as part of educational content will allow the documentation of various arts and culture in written and verbal form. It is also a medium of storage and inheritance that can possibly be developed by the upcoming generations*. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa mengintegrasikan unsur seni dan budaya sebagai bagian dari konten pendidikan akan memungkinkan pendokumentasian berbagai seni dan budaya dalam bentuk tertulis dan lisan. Hal tersebut merupakan media penyimpanan dan pewarisan yang mungkin dapat dikembangkan oleh generasi mendatang.

Nugraha, Zuriyati, & Attas, (2020: 148) menyatakan bahwa karya sastra diyakini sebagai sebuah usaha yang mampu menjembatani hubungan manusia dengan manusia itu sendiri, baik dalam keluarga, politik, negara, dan budaya karena dianggap sebagai alternatif estetis yang memungkinkan untuk menyesuaikan diri dan melakukan perubahan dalam suatu masyarakat. Adapun teori yang digunakan dalam menyusun narasi kontra radikalisme yaitu menggunakan teori dekonstruksi. Maksud dekonstruksi di sini adalah bagaimana diksi-diksi radikal, seperti Islam radikal didekonstruksi menjadi Islam moderat, khilafah didekonstruksi menjadi demokrasi, negara Islam didekonstruksi menjadi nasionalisme, dan pendidikan eksklusif didekonstruksi menjadi pendidikan inklusif.

Proses dekonstruksi sebagaimana yang disebutkan di atas menjadi sebuah langkah dalam menciptakan narasi-narasi kontra radikalisme. Hal ini menjadi penting sebab diskursus radikalisme yang tersebar luas di berbagai saluran perlu dilawan dengan wacana-wacana yang menyejukkan. Jika mengacu pada Fairclough (1995)

bahwa wacana itu adalah praksis sosial yang dapat mendikte sikap seseorang, maka langkah ini perlu dicoba dengan pertimbangan bahwa teks berita beserta kompleksitas maknanya bermuara pada persepsi publik. Persepsi seseorang akan selalu berdasar dan berangkat dari teks yang diproduksi dan direpresentasikan dalam sebuah teks pemberitaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Manshur (2012: 217) bahwa kondisi objektif masyarakat potensial untuk diintervensi ke dalam ideologi simbolik. Oleh karena itu, di sinilah peran analisis wacana kritis (AWK) untuk membedah, mengkaji, dan menyajikan secara objektif dan komprehensif diskursus radikalisme HTI.

Menarik untuk melihat bagaimana diskursus radikalisme HTI ini diproduksi dan direpresentasikan di media online, khususnya pada Tempo.co sebagai lokus penelitian ini. Tempo.co adalah media siber atau *online media* sebagai bentuk pengembangan dari Koran Tempo. Tempo.co menghadirkan berita dan informasi yang menarik, dapat diandalkan, independen, dan enak dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berkat kolaborasi jurnalistik dan teknologi yang mumpuni, kini Tempo.co telah memiliki *unique visitor* sebanyak 35 juta perbulan dan 6,8 juta *followers* di seluruh *platform* media sosial (Tempo, <https://www.tempo.id/corporate.php>, diakses 20 November 2021, pukul 05.06 WIB).

Tempo.co berupaya menerapkan standar tinggi jurnalisme dalam meliput peristiwa dan menuliskannya secara tajam, cerdas dan berimbang. Dengan prinsip yang dipegang teguh tersebut, media ini tercatat meraih prestasi, yakni penghargaan *Silver Award "The Best Mobile Media 2011"* dari Asia Digital Media Award 2011. Tempo.co juga menjadi juara dunia dalam kompetisi *Hackathon Media*, yang diselenggarakan asosiasi Global Editors Network di Wina, Austria, 17 Juni 2016. Bahkan belum lepas dari ingatan pembaca baru-baru ini di mana Tempo.co telah berhasil mengendus adanya dugaan penyalahgunaan donasi lembaga filantropi Aksi

Cepat Tanggap (ACT), dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan atas kasus tersebut.

Berdasarkan catatan penulis, diskursus radikalisme HTI yang diproduksi dan dipresentasikan di platform Tempo.co sebanyak 13 berita. Berita-berita tersebut diambil dari pemberitaan yang terbit sepanjang tahun 2017 s.d. 2019 (data terlampir). Dari data yang ditelusuri sepanjang tahun tersebut, penulis membaginya menjadi 3 kelompok berita, yaitu berita yang terbit pada periode tahun 2017, 2018, dan 2019. Berdasarkan klasifikasi tersebut, diperoleh gambaran adanya variasi tema-tema yang diangkat di setiap periode tahun tersebut. Menarik dari data ini adalah bagaimana Tempo.co mengambil peran sebagai mediator dalam memproduksi dan merepresentasikan diskursus radikalisme HTI pada platform yang mereka miliki. Interaksi segitiga dalam diskursus radikalisme HTI, yakni prodaktor, mediator, dan reseptor sangat relevan dengan teori AWK Norman Fairclough yang mengkaji aspek tekstual (analisis teks berita) pada dimensi mikro, aspek praksis diskursif (analisis produksi dan presentasi teks) pada dimensi meso, dan aspek praksis sosiokultural (analisis determinan dan efek) pada dimensi makro.

Penelitian ini juga sebagai bentuk literasi media pada masyarakat agar memiliki kemampuan kritis dalam menyerap setiap informasi, khususnya diskursus radikalisme yang dipresentasikan oleh media. Masyarakat awam pengguna android sangat rentan terpapar paham radikal, terpolarisasi, dan terprovokasi dalam gelontoran informasi yang melimpah. Banyak konten-konten yang secara substansi mengandung paham-paham radikal, baik itu yang tersirat di dalam teks ataupun yang dinyatakan secara tersurat mengandung pesan-pesan radikal. Muhaimin (Tempo.co, 12 Mei 2017) menyatakan berkembangnya paham radikalisme terorisme banyak melalui media cetak, media

daring, dan media sosial. Bahkan, para pengikut paham ini dibaiat tanpa harus bertemu secara langsung, hanya dengan melalui telepon pintar saja sudah cukup.

Selama masa Pandemi Covid-19 kewaspadaan terhadap radikalisme ini perlu dihadapi dengan lebih serius karena penyebarannya semakin lebih mudah dengan adanya internet sebagai ‘jalan tol’ masuk dan beredarnya paham-paham radikalisme. Internet ibarat halnya seperti banjir, selain membawa air, juga lumpur dan sampah. Sampah-sampah itu bisa berupa *fake news*, *hoax*, propaganda, dan sebagainya yang menggoda kita untuk meng-gibah, memfitnah (Hakim, 2018: 2), atau mungkin bahkan terpapar paham radikalisme. Di era digitalisasi saat ini, masyarakat digelontori dengan banyak informasi di media. Namun tidak semua informasi itu benar, banyak informasi *hoax*, informasi yang dimanipulasi, menyesatkan, dan memprovokasi. Oleh sebab itu, literasi media menjadi sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan kesadaran untuk melakukan cek, verifikasi, dan pemeriksaan dengan teliti dan hati-hati terhadap suatu informasi sebelum mempercayai dan menyebarkan.

Literasi media yang dibarengi dengan literasi kritis yang baik akan mendorong masyarakat lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan hati dan jari dalam bermedsos, mereka semakin tercerdaskan dan tercerahkan mengakses konten-konten online, menyaring sebelum *men-sharing*. Terlebih bangsa Indonesia selain menghadapi bahaya radikalisme dan Pandemi Covid-19, tahun 2024 juga akan melaksanakan Pemilu yang diprediksi memiliki tensi tinggi. Dalam momen seperti ini, peluang masuknya paham radikal akan semakin besar, terlebih jika ada oknum-oknum tidak bertanggung yang menunggangi dan memanfaatkan momentum ini demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Mereka yang memanfaatkan keluguan dan kepolosan masyarakat di akar rumput yang tidak sadar bahwa mereka digiring dan dieksplotasi secara berlebihan. Oleh karena itu, untuk menghindari hoaks, mencari informasi pbanding menjadi

salah satu cara verifikasi. Juliswara (2017: 142) menyatakan melalui pengembangan model kajian literasi media sebagai pendekatan yang memberdayakan pengguna media sosial (netizen) maka diasumsikan para netizen akan lebih mampu mengkonstruksi muatan yang positif dalam memanfaatkan media sosial.

Dalam proses pembedahan diskursus radikalisme HTI, penulis menggunakan pisau analisis AWK model Norman Fairclough. Dalam teorinya, Fairclough membagi proses analisis menjadi tiga dimensi yang saling berkorelasi, yaitu analisis tekstual, praksis diskursus, dan praksis sosiokultural (Fairclough, 1995). Teori ini dipilih karena secara objektif terlihat sangat komprehensif di mana dalam praktiknya berusaha menyatukan tiga tradisi intelektual: 1) analisis tekstual dalam bidang linguistik (termasuk grammar fungsional Michael Halliday; 2) analisis makrososiologis dari praktik sosial termasuk teori-teori Foucault yang tidak menyediakan metodologi analisis teks; dan 3) tradisi interpretatif mikrososiologis dalam disiplin ilmu sosiologi (Jorgensen dan Philips dalam Munfarida, 2014: 8).

Aspek substantif dalam AWK selain daripada ilmu linguistik sebagai pijakan dalam analisis tekstual, juga memerlukan pengetahuan dan wawasan peneliti tentang ilmu sosial. Hal itu perlu agar peneliti dapat mencapai level analisis pada aspek makro (praksis sosiokultural). AWK menganalisis teks-teks yang ada aspek linguistiknya. Suatu kajian AWK yang tidak berbasis pada aspek mikro atau tekstual, maka itu tidak dapat disebut sebagai AWK, itu disebutnya sebagai kajian sosial. Begitupun sebaliknya, jika suatu kajian hanya fokus pada aspek tekstual atau linguistiknya, itu disebut sebagai analisis wacana (AW) atau *discourse analysis*, bukan sebagai analisis wacana kritis. Jadi kata kunci yang dipegang teguh dalam AWK itu adalah aspek mikro dan aspek makro. Baik AWK versi van Dijk, Fairclough, maupun Wodak selalu berdasar pada konsep tersebut, yakni integrasi teori linguistik dan teori sosial yang berfungsi

menjelaskan hubungan antara aspek linguistik dan struktur sosialnya. Oleh karena itu, seorang peneliti dalam memilih AWK saat memilih suatu teks, ia sudah harus berpikir menguasai teori sosial apa? Kalau basis teksnya tentang gender, misalnya, maka seorang peneliti harus berpikir bahwa ia telah menguasai teori gender. Kalau basis teksnya tentang radikalisme, maka ia harus berpikir bahwa ia harus menguasai teori-teori radikalisme, terorisme, dan sebagainya.

Dengan menganggap diskursus sebagai praktik sosial, Fairclough secara otomatis menolak penyamaan diskursus dengan teks. Baginya, teks merupakan sebuah produk dari proses produksi teks dan bukan prosesnya itu sendiri. Adapun diskursus bersifat lebih luas yang mencakup seluruh proses interaksi sosial di mana teks hanya menjadi salah satu bagiannya. Dengan demikian, analisis diskursus yang ditawarkan tidak hanya terfokus pada teks saja, tapi juga mencakup konsumsi teks oleh pembaca dan sekaligus relasinya dengan kondisi sosiokulturalnya (Munfarida, 2014). Basis paradigmatis AWK tersebut telah membuka jalan baru kajian linguistik sebagai entitas yang fleksibel dan bisa berubah karena eksistensinya merupakan produk dari konvensi sosial. Kalangan pos-strukturalis melihat aspek fleksibilitas dalam strukturalisme yang memandang bahasa tidak *given*, tetapi bisa berubah-ubah karena merupakan hasil dari konvensi sosial. Atas dasar itu, eksistensi bahasa dianggap sarat dengan motif kekuasaan dan kepentingan kelompok sosial tertentu (Munfarida, 2014). Hal ini sejalan dengan pendapat Wangs (dalam Aris, 2012: 2) yang menyebut bahwa bahasa merupakan suatu praktik sosial. Melalui bahasa, seseorang atau kelompok ditampilkan atau didefinisikan. Juga pendapat Haryatmoko (2020) bahwa bahasa mendikte tindakan.

Bahasa tidak dilihat sebagai medium yang transparan, yang mengekspresikan pengalaman seseorang, atau peristiwa yang benar-benar terjadi tetapi sebagai konstruksi realitas dan subjektif. Penguasa memengaruhi aturan-aturan wacana secara ideologi

dalam pola-pola tertentu. Lebih lanjut bahwa ada peluang individu ataupun kelompok (sosial) yang kuat untuk melakukan penetrasi terhadap kelompok lain yang lebih lemah (Aris, 2012: 2). Selain itu, sebaliknya ada pula individu atau kelompok yang lemah dan termarginalkan untuk melakukan resistensi atau perlawanan atas wacana yang dipresentasikan oleh individu atau kelompok yang dominan. Membuktikan pernyataan itu, penulis menyajikan 1 contoh kalimat yang mengandung suatu ideologi minoritas yang termarginalkan melawan kelompok yang mendominasi. Pernyataan ini dikutip dari Yahoo.news yang terbit pada 7 Juni 2020 dengan judul “Dialog: Cara mengajari anak kulit hitam tentang dunia yang mereka hadapi” sebagai berikut:

“Ada garis tipis antara kepercayaan diri yang akan membantu Anda menjadi sukses, dan menjadi **terlalu** percaya diri yang bisa membuat Anda terbunuh,”

Pernyataan ini keluar dari pengacara ras kulit hitam Amerika. Kalimat ini terlihat biasa saja secara tekstual, namun dalam AWK teks ini mengandung makna yang sangat kompleks. Kutipan tersebut bukan sebatas sebuah informasi, ada ideologi yang ingin disampaikan oleh si penutur dalam konteks *setting* di Amerika. Berdasarkan analisis teks terlihat bahwa ada satu kalimat yang terdiri atas dua klausa. Dan satu kata kunci yang perlu digarisbawahi adalah pada penggunaan kosakata “terlalu” yang membedakan antara “kepercayaan diri yang akan membantu Anda menjadi sukses” dan “menjadi *terlalu* percaya diri yang bisa membuat Anda terbunuh”. Produksi teks ini lahir sebagai respon atas kematian George Floyd warga kulit hitam Amerika yang dibunuh oleh Derek Chauvin seorang polisi yang bertugas di Minneapolis pada Mei 2020. Sontak pembunuhan itu mendapatkan reaksi dan demonstrasi secara besar-besaran di Amerika dan beberapa negara lainnya yang menentang segala bentuk diskriminasi. Adapun analisis praksis sosiokultural di mana warga kulit hitam di Amerika Serikat yang selama ini mengalami diskriminasi, penindasan, dan kekerasan fisik dan verbal di ruang-ruang publik. Hal ini tentunya kontradiktif dengan nilai-nilai

emansipasi dan demokrasi di seluruh dunia, khususnya di Amerika Serikat yang diklaim sebagai negara pencetus demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan kajian pustaka dari khasanah penelitian dan kepustakaan di Indonesia dan dunia, dapat diketahui bahwa penelitian yang berjudul “*Diskursus Radikalisme Hizbut Tahrir Indonesia: Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan Media Tempo.co*” sejauh ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Namun demikian, penelitian sebelumnya telah secara parsial beririsan dengan penelitian ini. Hal itu dapat dijumpai pada penelitian yang dilakukan oleh Subagyo (2016) pada penelitiannya berjudul “Representasi Frame dalam Latar Belakang Wacana Tajuk tentang Terorisme” yang terbit pada *Jurnal LITERA*, Vol. 15(1). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Osman (2010) dengan judul “The Transnational Network of Hizbut Tahrir Indonesia” yang terbit pada jurnal *South East Asia Research*, Vol. 18(4). Penelitian lainnya yakni oleh Waki Ats Tsaqofi (2021) dalam tesisnya berjudul “Diskursus Khilafah di Youtube: Analisis Wacana Kritis pada Ustaz HTI” di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Anshori (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Wacana Keagamaan Syiah-Sunni dalam Majalah *Tempo* dan *Suara Hidayatullah*” *Jurnal LITERA*, 13(1). Penelitian lain yang relevan dilakukan Törnberg & Törnberg (2016) dalam *Journal Discourse, Context and Media* pada artikel yang berjudul “Muslims in Social Media Discourse: Combining Topic Modeling and Critical Discourse Analysis”. Selanjutnya, penelitian oleh Wah dan Ming (2010) dengan judul “A Critical Discourse Analysis of the Malaysian Smart Schools (MSS) Conceptual Blueprint and Implication to Implementation”. Penelitian yang mengangkat masalah radikalisme yang ditinjau dari sudut pandang ekonomi dilakukan oleh ekonom dan pengajar Fakultas Ekonomi – UI,

Faisal Basri yang berjudul “Mendeteksi Akar Ekonomi dari Radikalisme dan Gejolak Sosial” yang terbit pada <https://katadata.co.id> pada 11 Januari 2017.

Selanjutnya terkait dengan upaya menangkal paham-paham radikal, beberapa peneliti sudah melakukan publikasi, seperti yang dilakukan Rodli, Boeriswati, dkk. (2017) tentang penggunaan strategi “HEBAT” dalam upaya deradikalisasi di perguruan tinggi NU. Penelitian yang dilakukan oleh Nuzulatul Afifah (2021) dalam skripsi berjudul “Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk terhadap Upaya mencegah Radikalisme dalam Buku *Hijrah dari Radikal ke Moderat* karya Haris Amir Falah”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk mencegah radikalisme dalam buku *Hijrah dari Radikal ke Moderat* karya Haris Amir Falah adalah dengan menjaga silaturahmi dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Terkait dengan AWK, ia menemukan dari segi teks bahwa menjaga silaturahmi merupakan awal dari tumbuhnya sikap toleransi dan juga penanaman wawasan ilmu pengetahuan yang baik dan benar sedini mungkin dapat menjadi upaya dalam mencegah radikalisme. Dari segi kognisi sosial bahwa upaya mencegah radikalisme yang dijelaskan dalam buku *Hijrah dari Radikal ke Moderat* merupakan keinginan dakwah Haris Amir Falah dalam upaya mengajak masyarakat agar terhindar dari pemikiran radikal seperti yang pernah ia alami. Sedangkan dari segi konteks sosial buku *Hijrah dari Radikal ke Moderat* berisi tentang upaya mencegah radikalisme ditanggapi secara positif di kalangan masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rozi (2019) berjudul “Pendidikan Moderasi Islam KH. Asep Saifuddin Chalim: Mencegah Radikalisme Agama dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia” yang terbit di *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 8(1). Hasil penelitian tersebut, yaitu 1) Pencegahan radikalisme agama melalui pendidikan dilakukan dengan melaksanakan pendidikan

yang berkualitas sesuai dengan prinsip aswaja Islam dan dengan lebih menekankan tanggung jawab guru tidak hanya untuk mengajar, tetapi juga mengawasi dan mendampingi siswa di dalam dan di luar kelas sehingga menjadi ujung tombak dalam menjaga, melestarikan dan membumikan eksistensi aswajata. Tanggung jawab dilakukan dengan pendekatan pengasuhan dan pendidikan (andragogi). 2) Masyarakat madani adalah masyarakat yang selalu melakukan proses pencarian jati diri dan menjamin kebebasan individu untuk tumbuh dewasa sehingga memiliki kemampuan dan kesempatan untuk membangun budaya kewarganegaraan. Hal ini dibentuk dengan menerapkan sistem pendidikan berbasis unsur budaya yang mempertimbangkan etika, estetika dan religiusitas sehingga intelektual muda memiliki ketangguhan dan keunggulan yang merupakan titik awal untuk membangun masyarakat madani.

Kebaruan penelitian ini (atau kita sebut melengkapi penelitian sebelumnya) terletak pada lima aspek, yakni pada 1) objek material, 2) sumber data yang digunakan, 3) objek formal atau aspek metodologis dan teoretis, 4) isu atau topik yang diangkat, dan 5) hasil atau temuan penelitian dan luaran penelitian. Lima aspek sebagaimana disebutkan tersebut diakui bahwa secara parsial telah diteliti oleh orang lain, tetapi aspek lainnya juga secara parsial belum tersentuh. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada penggunaan metode dan teori yang multidisipliner, yakni menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan teori AWK sebagai pisau analisisnya, serta didukung metode analisis isi Mayring. Selain itu, kebaruan dapat dilihat pada aspek objek material atau data dan sumber data yang secara spesifik pada pemberitaan Tempo.co tahun 2017 s.d. 2019, serta hasil penelitian yang lebih komprehensif membedah diskursus radikalisme HTI pada berbagai aspek. Penelitian ini juga sebagai misi untuk memberikan pertolongan kepada dunia bahwa radikalisme itu benar-benar ada dalam berbagai bentuk dan cara-cara, bisa jadi dia ada di sekitar kita,

bahkan mungkin kita sudah terkontaminasi paham-paham radikal tanpa sedikitpun kita menyadarinya.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, fokus penelitian ini adalah diskursus radikalisme Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada pemberitaan media online Tempo.co ditinjau dari AWK model Norman Fairclough, yaitu analisis teks, praksis diskursus, dan praksis sosiokultural. Radikalisme yang dimaksud dalam hal ini adalah radikalisme ideologi dalam beberapa kategori, yaitu pada kategori agama, politik, pemerintahan, dan pendidikan. Yang menarik di sini adalah bagaimana diskursus tersebut direpresentasikan oleh Tempo.co dalam pemberitaan di media online sebagai suatu pertarungan ideologi untuk tujuan hegemoni. Adapun subfokus dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Diskursus radikalisme HTI pada kategori agama dalam pemberitaan Tempo.co.
2. Diskursus radikalisme HTI pada kategori politik dalam pemberitaan Tempo.co.
3. Diskursus radikalisme HTI pada kategori pemerintahan dalam pemberitaan Tempo.co.
4. Diskursus radikalisme HTI pada kategori pendidikan dalam pemberitaan Tempo.co.

C. Pertanyaan Penelitian

Secara umum, pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah diskursus radikalisme Hizbut Tahrir Indonesia pada pemberitaan media online Tempo.co ditinjau dari AWK model Norman Fairclough?” Secara khusus, pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah diskursus radikalisme HTI pada kategori agama dalam pemberitaan Tempo.co?

2. Bagaimanakah diskursus radikalisme HTI pada kategori politik dalam pemberitaan Tempo.co?
3. Bagaimanakah diskursus radikalisme HTI pada kategori pemerintahan dalam pemberitaan Tempo.co?
4. Bagaimanakah diskursus radikalisme HTI pada kategori pendidikan dalam pemberitaan Tempo.co?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang objektif, mendalam, dan komprehensif tentang diskursus radikalisme HTI pada pemberitaan media Tempo.co ditinjau dari AWK model Norman Fairclough. Diskursus radikalisme yang dimaksud dalam hal ini adalah penolakan HTI terhadap Pancasila dan UUD 1945 dan ingin menggantinya dengan ideologi khilafah yang direpresentasikan dalam pemberitaan Tempo.co melalui kata-kata, frase, klausa, kalimat, atau wacana. Dalam proses analisisnya, peneliti menggunakan pisau analisis AWK model Norman Fairclough yang membagi analisis menjadi 3 tahap, yaitu analisis teks, praksis diskursus, dan praksis sosiokultural. Secara rinci tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh pemahaman yang objektif, mendalam, dan komprehensif tentang diskursus radikalisme HTI pada kategori agama dalam pemberitaan media Tempo.co.
2. Untuk memperoleh pemahaman yang objektif, mendalam, dan komprehensif tentang diskursus radikalisme HTI pada kategori politik dalam pemberitaan media Tempo.co.
3. Untuk memperoleh pemahaman yang objektif, mendalam, dan komprehensif tentang diskursus radikalisme HTI pada kategori pemerintahan dalam pemberitaan media online Tempo.co.

4. Untuk memperoleh pemahaman yang objektif, mendalam, dan komprehensif tentang diskursus radikalisme HTI pada kategori pendidikan dalam pemberitaan media online Tempo.co.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dipilah pada nilai manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan tambahan pemahaman dan pengembangan wawasan pada beberapa bidang ilmu sebagai berikut.

- a. Teori media, hasil penelitian memberikan sumbangan pemikiran terkait peran media online dan pengembangannya sebagai sarana penyampaian pesan edukatif di masyarakat.
- b. Teori AWK sebagai bidang ilmu dalam linguistik terapan yang dapat digunakan pada berbagai wacana atau teks-teks sosiokultural, agama, politik, pendidikan, dan sebagainya khususnya karakteristik wacana radikalisme pada media online.
- c. Teori radikalisme, hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran terkait diskursus radikalisme pada media online. Hal ini menjadi penting sebab di tengah-tengah masyarakat masih terjadi distorsi dan pro-kontra pemahaman tentang apa itu radikalisme dan khilafah.
- d. Teori sastra, hasil penelitian ini memberikan sumbangan terkait pemanfaatan karya sastra pantun sebagai kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di jenjang perguruan tinggi.
- e. Penelitian lanjutan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi riset-riset selanjutnya, khususnya kajian diskursus radikalisme pada berbagai platform, baik itu media online, cetak, maupun elektronik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi masukan positif untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
- b. Bagi dosen dan guru, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan ajar atau materi pembelajaran analisis wacana, analisis wacana kritis, pembelajaran sastra, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya yang dapat meningkatkan pemahaman dan nilai-nilai cinta tanah air.
- c. Bagi para pendakwah dan tokoh-tokoh agama di Indonesia, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru terkait diskursus radikalisme di mana temuan ini dapat menjadi referensi dakwah yang disampaikan kepada umat terkait ajaran-ajaran yang menyejukkan dan penuh kedamaian.
- d. Bagi orang tua, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi terkait peran orang tua dalam membentuk kepribadian dan akhlak anak. Orang tua harus lebih memperhatikan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak. Karena ada beberapa lembaga pendidikan formal maupun non formal yang memiliki muatan radikalisme dalam kurikulum, program pendidikan, hingga substansi materi yang diajarkan. Dengan demikian, orang tua akan selektif dan verifikatif dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak-anak, termasuk mengontrol penggunaan gadget.
- e. Bagi organisasi masyarakat (ormas), hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang dapat memperkaya wawasan kebangsaan sehingga selanjutnya dapat berkontribusi dalam kehidupan beragama, berpolitik, berbangsa, dan bernegara.
- f. Bagi pembaca secara umum, penelitian ini akan menambah khasanah pengetahuan dan kesadaran personal tentang bahaya radikalisme HTI atau organisasi radikal

lainnya sehingga dengan itu menjadi lebih bijak menanggapi setiap diskursus radikalisme dengan melakukan verifikasi, sehingga tidak mudah termakan hoaks.

g. Hasil penelitian ini juga akan menjadi bahan refleksi untuk menentukan keberpihakan pembaca, khususnya kepada siapa-siapa saja yang pantas didukung pada kontestasi Pemilu serentak 2024 yang semakin dekat, apakah kepada orang atau kelompok yang berideologi Pancasila atau kepada mereka yang radikal yang ingin meruntuhkan eksistensi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan semboyan bhinneka tunggal ika.

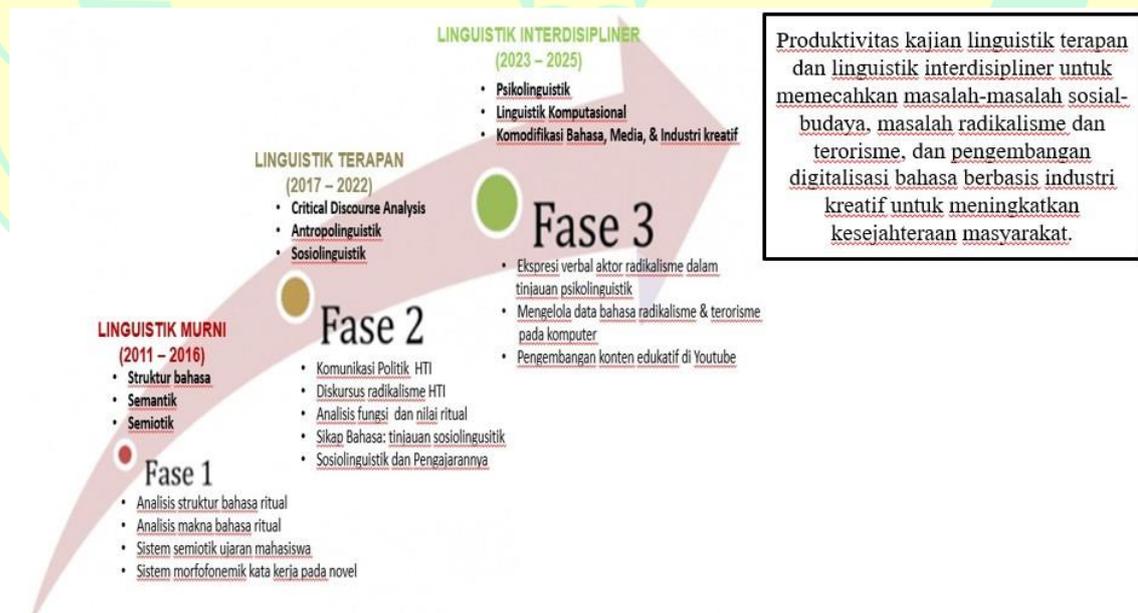
F. Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini (atau kita sebut melengkapi penelitian sebelumnya) terletak pada lima aspek, yakni pada 1) objek material, 2) sumber data yang digunakan, 3) objek formal atau aspek metodologis dan teoretis, 4) isu atau topik yang diangkat, dan 5) hasil atau temuan penelitian. Lima aspek sebagaimana disebutkan tersebut diakui bahwa secara parsial telah diteliti oleh orang lain, tetapi aspek lainnya secara parsial juga belum tersentuh. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada penggunaan metode dan teori yang multidisipliner, yakni menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, melibatkan teori AWK sebagai pisau analisis, serta didukung metode analisis isi. Selain itu, kebaruan dapat dilihat pada aspek objek material atau data dan sumber data yang secara spesifik memiliki perbedaan pada aspek-aspek tertentu, hasil penelitian yang lebih komprehensif membedah diskursus radikalisme HTI melalui teori AWK Norman Fairclough, pengembangan hasil penelitian dengan mengangkat pantun sebagai narasi alternatif dalam upaya kontra radikalisme melalui teori dekonstruksi, serta penerapannya dalam pembelajaran menulis transformasi pantun menjadi cerpen di jenjang perguruan tinggi. Penelitian ini juga sebagai misi untuk memberikan pertolongan kepada dunia bahwa radikalisme itu benar-benar ada

dalam berbagai bentuk dan cara-cara tertentu, bisa jadi dia ada di sekitar kita, bahkan mungkin kita sudah terkontaminasi paham-paham radikal tanpa sedikitpun kita menyadarinya.

G. Road Map Penelitian

Road map atau peta jalan penelitian merupakan gambaran perjalanan riset yang penulis lakukan dalam periode waktu tertentu. *Road map* ini sangat penting sebagai panduan dan pedoman bagi peneliti dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan penelitian. Ada tiga komponen penting yang dimuat dalam *road map* penelitian, yaitu 1) penelitian **yang telah** dilakukan, 2) penelitian **yang sedang** dilakukan, dan 3) penelitian **yang akan** dilakukan pada periode berikutnya untuk mencapai tujuan akhir. Ketiga komponen tersebut menjadi suatu petunjuk untuk menentukan keterkaitan atau irisan antara aktivitas yang telah, sedang, dan akan peneliti lakukan secara strategis dalam meneliti suatu topik radikalisme. Adapun *road map* penelitian ini sebagai dapat dilihat pada gambar 1.3 sebagai berikut.



Gambar 1.3 Road map penelitian

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat tiga fase yang menunjukkan bahwa penelitian disertasi ini tidak ujug-ujug hadir, tetapi lahir dari suatu *road map* atau pejalan penelitian yang di mana sejak awal peneliti sudah memiliki perhatian pada penelitian-penelitian kebahasaan. Hal itu dapat dilihat pada fase awal di mana peneliti sudah memiliki atensi dalam penelitian dengan tema-tema linguistik murni, seperti struktur bahasa, semantik, dan semiotik. Pada fase ke-2 peneliti sudah naik ke anak tangga berikutnya pada linguistik terapan, di mana topik-topik penelitian terkait dengan *critical discourse analysis*, antropolingistik, dan sosiolinguistik. Adapun fase lebih lanjut peneliti akan lebih memperdalam pada kajian linguistik interdisipliner, di mana topik-topik penelitian yang akan diangkat adalah psikolinguistik, linguistik komputasional, komodifikasi bahasa-media-dan industri kreatif. Uraianya adalah sebagai berikut.

Fase Pertama, fase 1 di mana pada tahun 2011 – 2016 suatu periode yang merepresentasikan peneliti berkecimpung pada kajian-kajian linguistik murni, seperti pada topik kajian struktur, semantik, dan semiotik, dan sebagainya. Hal itu dapat dilihat pada hasil penelitian penulis, yakni 1) Hasil penelitian skripsi berjudul “Makna Tuturan dalam Upacara Adat *Katoba* pada Masyarakat Muna” di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Halu Oleo Kendari tahun 2011, 2) Hasil penelitian tesis berjudul “Upacara Adat *Katoba* pada Masyarakat Muna: (Analisis Struktural, Nilai-nilai Kultural, dan Pemanfaatannya dalam Pembelajaran Apresiasi Sastra Lama di Sekolah Menengah Atas) tahun 2013, dan 3) Publikasi artikel hasil penelitian berjudul “The Use of Indonesian Speech as a Semiotic System of the Universitas Pendidikan Indonesia Students” yang diterbitkan di *Journal of Indonesian Language Education and Literary*, ISSN Cetak: 2548-7418, ISSN Online: 2548-222X, Volume 1, No. 2, Desember 2016.

Fase Kedua, yakni dalam kurun waktu tahun 2017 – 2022 (periode studi Doktor Linguistik Terapan Pascasarjana UNJ) suatu periode perkembangan kajian di mana peneliti melibatkan tidak hanya ilmu linguistik murni sebagai kajian mikro bahasa, namun juga masuk aspek makro bahasa yakni bagaimana bahasa itu digunakan pada berbagai bidang, seperti kajian AWK pada media, antropolingusitik untuk melihat penggunaan bahasa pada kebudayaan tertentu, serta sosiolinguistik untuk melihat bagaimana bahasa itu digunakan di masyarakat. Hal itu dapat dilihat pada karya penulis, yakni 1) Publikasi artikel hasil penelitian berjudul “Political Communication of the *Hizbut Tahrir Indonesia: A Critical Discourse Analysis*” yang diterbitkan di Journal of Indonesian Language Education and Literary, ISSN Cetak: 2548-7418, ISSN Online: 2548-222X, Volume 2, No. 2, December 2017, 2) Publikasi artikel hasil penelitian berjudul “Tolakinese Language Attitude toward Tolaki-Dialect of Mekongga in Kolaka District”, yang diterbitkan di Journal of Indonesian Language Education and Literary, ISSN Cetak: 2548-7418, ISSN Online: 2548-222X, Volume 2, No. 2, December 2017, 3) Publikasi artikel hasil penelitian berjudul “Morphophonemic Rule of Process Verbs in the Novel *Di Bawah Bayang-Bayang Ode* by Sumiman Udu” yang diterbitkan di Journal of Indonesian Language Education and Literary, ISSN Cetak: 2548-7418, ISSN Online: 2548-222X, Volume 2, No. 1, June 2017, 4) Publikasi buku ajar berjudul “Retorika: Tinjauan dari Pendekatan Pragmatik” yang diterbitkan oleh Penerbit Putri Yolanda tahun 2017, ISBN 978-602-73854-1-2 dimana peneliti berperan sebagai editor, 5) Publikasi buku berjudul “Sosiolinguistik dan Pengajarannya” yang diterbitkan oleh Penerbit Putri Yolanda tahun 2017, ISBN 9786025255847 sebanyak 293 halaman dimana peneliti berperan sebagai editor buku.

Fase Ketiga, dalam beberapa tahun ke depan 2023 – 2025, yakni suatu periode yang semakin menantang dimana peneliti menyentuh pada kajian-kajian

psikolinguistik, linguistik komputasional, serta komodifikasi bahasa, media, dan industri kreatif. Kajian psikolinguistik yang akan dikembangkan ke depan adalah mengkaji ekspresi verbal aktor-aktor atau pelaku radikalisme. Kajian ini menjadi strategis untuk melihat bagaimana kecenderungan seseorang menggunakan bahasa yang merepresentasikan ideologi-ideologi radikal. Dalam prosesnya, kajian ini berpeluang untuk dikembangkan dengan melihat aspek neurolingusitik, serta aspek-aspek non verbal yang muncul. Dengan kajian ini, pemangku kepentingan dapat memanfaatkannya sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan paham-paham radikal. Selanjutnya, linguistik komputasional akan melihat bagaimana pengelolaan data-data atau kosakata-kosakata radikalisme dan terorisme di media berbasis daring. Adapun komodifikasi bahasa, media, dan industri kreatif dilakukan untuk melihat potensi bahasa sebagai sebuah produk yang dapat dikembangkan dalam membangun diskursus kontra radikalisme yang ditampilkan secara kreatif dan inovatif di media berbasis internet, seperti pembuatan video TikTok atau YouTube berisi pesan perdamaian, dan sebagainya. Hal ini kemudian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kajian linguistik terapan dan linguistik interdisipliner untuk memecahkan masalah-masalah sosial-budaya, masalah radikalisme dan terorisme, dan pengembangan digitalisasi bahasa berbasis industri kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.